

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Literatur

- Chazawi, Adami (II), *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* (Cetakan Kedua), Penerbit Bayumedia Pulishing, Malang, 2005.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013).
- Dariji Darnodihardjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Umum: Jakarta, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, PT Aksara, Jakarta, 1987.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Ghana Indonesia), Jakarta, 1985.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hanifah Erma, *Stop Korupsi*, Tangerang: Loka Aksara, 2019.
- H Ardhian Eko, *Kompilasi Hukum Korupsi*, Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Latif, Abdul, *Hukum Adminisreasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prena Media Grup, 2014).
- Mangasa Sidabutar, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Makawimbang Hernol Ferry, *Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan R.I. Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian, Ghalia Indonesia*: Jakarta, 1998.

- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Nugroho Widi, *Mudahnya Korupsi*, Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017.
- Rahman, Amin, *Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, E-Book, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hal 212-220.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sasongko Warso, *Korupsi*, Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 13-15.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2013.
- Ramiyanto, "Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2018.
- Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990).
- R. Subakti dan Tjitrosoedibjo dalam Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014, hlm 172 Amin Rahman, *Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, E-Book, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Sinaga Dahlan, "Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila". (Bandung: Nusamedia. 2018).
- Wiryo Prodjodikoro, 1967, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Jakarta.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

## 2. Jurnal

- Cahyadi, I Made Sandi dkk, Pengaturan Sanksi Kumulatif Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.1 No.1, 2020, Denpasar: Universitas Warmadewa.
- Dwisvimiari Inge, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11 No.3, 2011.
- Hendriawan, Benaya, Pertimbangan Pengadilan Tinggi Dalam Memutus Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Verstek*, Vol.5 No.1, 2017, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Fattah Damanhuri, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*. Jurnal Tapis, Vol. 9 No. 2, 2013.
- Febriana Adinda dan Viona Salsabila, *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Suap Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia*, Datin Law Journal, Vol. 1 No. 1, 2020.
- Febriansyah, Ferry Irawan. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 25, 2017.
- Ferdian Ardi, *Sistem Pembebanan Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Arena Hukum, Vol.6 No.3, 2012.
- Gulo Nimerodi dan Ade Kurniawan Muharram, *Disparatis dalam Penjatuhan Pidana*, Masalah- Masalah Hukum. Jilid 47 No. 3, 2018.
- Gusmawati Ila. "Banding" Makalah, 2021.
- Hasannudin Iqbal, *Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik Menurut John Rawls*, Jurnal Jurnal Refleksi, Vol. 17 No. 2, 2018..
- Hidayat, *Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal EduTech, Vol.3 No.2, 2017.
- Ilmar, Aminuddin, "Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum". Universitas Hasanuddin, Makasar, 2009.
- Imron Ali dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Tangerang Selatan: Unsam Press, 2019.
- Prabowo, Aji, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2011/Pn.Tpk.Smg Tentang Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Karangjambu Di Kabupaten Tegal, Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2020.
- Sumarni, Alam, 2017, Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi dalam Praktek Indonesia, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5 No. 2.

- Susanti, Ante, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana, *Lex Crimen*, Vol.2 No.2, 2013.
- Karel Antonius Paeh, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan Hubungan dengan Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, e-Jurnal Katalogis, Vol. 5 No.2, 2017.
- Karoba Maikel, Sistem Pembuktian dan Pidanaan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001, *Lex Crimen*, Vol.8 No.9, 2019.
- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia di Hubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi 2003*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.4 No.1, 2015.
- Lumempouw Bilryan, Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum dalam Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.2 No.3, 2018.
- Hutajulu, Marihot Janpieter, 2015, Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan Hakim, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 9 No.1.
- Mawikere Andre Leonardo. "Tanggungjawab Pidana Terhadap Perbuatan Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Lex Crimen*. Vol.V No.5. 2016.
- M. Ilham Wira Pratama, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Lex Renaissance*, No.1 Vol.1 Vol.4, 2019, Yogyakarta: Universitas Indonesia.
- M. Nurul Irfan, Gratifikasi di Mahkamah Konstitusi dan Wacana Hukuman Mati, *Jurnal Hukum Madania*, Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014.
- Mumbunan Rendi Renaldi, Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.VII No.10, 2018.
- Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, (Citra Aditya), Bandung, 2006.
- Muslihin Rais, Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol.6 No.1, 2017.
- Nimerodi Gulo. Meninjau Ulang Sistem Pembinaan Narapidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Legalitas*. Vol. 01 No.1. 2019. Lampung: Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- Novi Faisal Malik, Pembatalan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (Vrijspraak) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan No. 13. Pid. Sus-TPK/2014/PN. Bna Jouncto Putusan Mahkamah Agung No. 914 K/PID.SUS/2015). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.

- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2010.*
- Putra Halomoan Hsb, *Tinjauan Yuridis Tentang Upaya- Upaya Hukum, Jurnal Hukum Ekonomi, Vo.1 No.1, 2015.*
- Rahardjo, Mudjia. "Metode pengumpulan data penelitian kualitatif." (2011).
- Rudiyanto, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dalam Pasal 8, Pasal 9, Dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Uu No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.*
- Ruman Yustinus Suhardi, *Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Keadilan, Humaniora, Vol.3 No.2, 2012.*
- Soetardjo Anggilita, *Sistem Pembuktian dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001, Lex Crimen, Vol.X No.7, 2021.*
- Sonda Tallesang, Ismail Navianto, Abdul Madjid. (2013). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang).* Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9).
- Sitohang, Hisar. *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif, Universitas HKBP Nommensen, 2020.*
- Sunarto, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Spektrum Hukum, Vo. 15 No.1, 2018.*
- Sulardi Sulardi & Yohana Puspitasari Wardoyo. (2015). *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt. Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 8(3).*
- Susanti, Liana Endah. "Kajian Terhadap Sila Keadilan dan Teori Keadilan Berfalsafah Libertarianisme dari Sudut Pandang Berideologi Pancasila." *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.4 No.2, 2018.*
- Sutrisno dkk, *Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi, Gorontalo Law Review, Vol.3 No.2, 2020.*
- Syahroni Muh. Arif dkk, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol15 No.2, 2019.*
- Tarigan, Victor Osmond. "Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Di Indonesia." *E-Journal. (2016).*

Thezar Muh dan St Nurjanah, Tindak Pidana Dalam Penggelapan Jabatan, *Alauddin Law Development Journal*, Vol.2 No.3, 2020.

Wantu, Fence M, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No.3, 2012, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

Wiharsa, I Made dkk, *Analisis Terhadap Kata "Dapat" Merugikan Keuangan Negara Dalam Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, e Jurnal Revisi.

Wedha Yogi Yasa dan I Made Wirya Darma, Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol.1 No.2, 2018.

Wibowo Ari, *Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan)*, *Jurnal Yuridis*, Vol.7 No. 1, 2020.

Yoane Angeline Takasihaeng, Eksistensi Seks Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Lex Crimen*, Vol.4 No.7, 2015.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi